

ANALISIS PENGARUH PDRB, INFLASI, NILAI KURS, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KABUPATEN CILACAP, BANYUMAS, PURBALINGGA, KEBUMEN DAN PURWOREJO

Mispiyanti¹, Ika Neni Kristanti²

¹ STIE Putra Bangsa, mispiyanti@gmail.com

² STIE Putra Bangsa, kris_tanty@yahoo.com

Abstrak

Pajak berfungsi untuk mengurangi ketidaksetaraan di antara penduduk karena pengeluaran pemerintah yang substansial untuk pembiayaan negara salah satu sumbernya adalah dari pendapatan pajak. Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial apakah PDB, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan juga untuk mengetahui apakah PDRB, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan tenaga kerja berpengaruh simultan secara positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan data realisasi penerimaan pajak, data PDB, data inflasi, dan data ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purworejo serta data nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PDRB dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak sedangkan inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Secara simultan variabel PDRB, inflasi, nilai tukar dan tenaga kerja, signifikan dalam mempengaruhi variabel penerimaan pajak.

Kata Kunci : inflasi, nilai tukar dollar AS, PDRB, penerimaan pajak, tenaga kerja

Abstract

Taxes serve to reduce inequalities among the population and thus demand substantial government expenditures for state financing which one of the sources is tax revenue. But many factors affect the high low tax revenue. This study aims to determine partially whether the GDP, inflation, the exchange rate of rupiah against US Dollar and labor have a positive effect on tax revenues and also to determine whether GRDP, inflation, the exchange rate of rupiah against US Dollar and labor in together have a positive effect on tax revenue. This study uses data realization of tax revenue, GDP data, inflation data, and employment data in the districts of Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purworejo as well as data on the Rupiah exchange rate against US Dollar. The results show that partially PDRB and labor positively affect the tax revenue while inflation and the exchange rate of rupiah against US Dollar have no positive effect on tax revenue. In together the variables PDRB, inflation, exchange rate and labor, significantly affect the variable tax revenue.

Keywords: GRDP, inflation, labor, tax revenue, US Dollar exchange rate,

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak berasal dari iuran wajib masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah dan pembebanannya berhubungan dengan aktivitas tertentu (Hyman, 2011). Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan umum dari semua kegiatan pemerintah diantaranya adalah pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, alokasi pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar

pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dengan demikian, pajak berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga menuntut pengeluaran pemerintah yang besar untuk pembiayaan negara dimana salah satu sumbernya adalah penerimaan pajak.

Di tahun 2012 sampai 2014, penerimaan pajak selalu dibawah target yang ditetapkan. Kurangnya penerimaan pajak dari target yang telah ditentukan pada tahun 2012 adalah karena pengaruh krisis global terhadap perusahaan di dalam negeri. Krisis global menyebabkan turunnya kinerja penjualan yang berakibat pada menurunnya penerimaan pajak. Tak tercapainya penerimaan pajak pada 2013 membuat pemerintah gagal mencapai target *tax ratio* yang dibidik. Pemerintah tercatat hanya bisa memenuhi *tax ratio* sebesar 11,47% atau lebih rendah dari target 12,21%. Rendahnya pencapaian realisasi penerimaan pajak tahun 2014 merupakan pengulangan dari prestasi (kegagalan) pemerintah dalam beberapa tahun ke belakang. Namun menurut Brodjonegoro (2015), tidak tercapainya penerimaan pajak sesuai target karena bukan perekonomian yang jelek tapi disebabkan pemerintah baik pusat maupun daerah yang tidak disiplin dalam sosialisasi tata cara perpajakan. Sebagaimana hasil dari OECD *economic survey*, (2015) sejak tahun 2012, perekonomian Indonesia mengalami banyak gejolak namun pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melampaui negara-negara lain di ASEA.

Kondisi berbeda terlihat dalam realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II pada tahun 2014 mencapai Rp6,862 triliun atau 103,74 persen dari target sebesar Rp6,615 triliun. Hal ini didukung oleh data dari Kantor Penerimaan Pajak (KPP) Pratama Purbalingga dimana penerimaan pajak tahun 2014 telah melampaui target. Penerimaan pajak sebesar Rp 374.394.540.561 atau mencapai 103,14% dari target penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp 362.987.927.309. Capaian ini naik sebesar 9,4% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013. Selain itu pendapatan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen pada 2014 melampaui target. Dari target yang direncanakan sebesar Rp 221,51 miliar hingga akhir tahun terealisasi 240,36 miliar.

Hubungan antar variabel ekonomi makro dan penerimaan pajak juga banyak diteliti di beberapa negara, salah satunya studi yang dilakukan oleh Zhang dan Cui dalam Wijayanti (2015) dengan studi kasus Cina. Zhang dan Cui menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penerimaan pajak dengan faktor ekonomi makro berupa produk domestik bruto. Hal ini menandakan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak salah satunya ditentukan oleh PDRB (Produk Domesti Regional Bruto). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berarti pula meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk membangun program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas masyarakat yang

akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan pungutan lainnya.

Sementara itu, masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu inflasi (Rahmany, 2014). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (2014) menyatakan, penerimaan pajak akan lebih baik karena tren penurunan inflasi yang menyebabkan kenaikan pada pendapatan Rumah Tangga. Penurunan inflasi berpengaruh ke penerimaan pajak. Adanya pertumbuhan penerimaan negara seiring dengan meningkatnya konsumsi yang terjadi di masyarakat. Penurunan angka inflasi pada tahun 2014 akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat, sehingga kondisi ini akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan negara.

Potensi penerimaan pajak salah satunya sangat tergantung pada tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang besaran nilainya ditentukan oleh kondisi perekonomian makro dimana salah satu indikatornya dilihat dari nilai kurs rupiah per US Dolar. Peningkatan atau penurunan penghasilan wajib pajak akibat fluktuasi kurs mata uang akan mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Yuksel, Orhan, dan Oztunc dalam Wijayanti (2015) dengan studi kasus Turki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara penerimaan pajak dan variabel ekonomi makro salah satunya berupa nilai tukar.

Banyaknya tenaga kerja juga akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Rata-rata jumlah tenaga kerja diwilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo rata-rata sebanyak lima ratus ribuan orang yang bekerja. Jumlah ini berfluktuasi dimana tahun 2013 jumlah tenaga kerja menurun dibandingkan tahun 2012. Namun tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja dibanding tahun 2012 dan 2013. Semakin banyak tenaga kerja dalam suatu wilayah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan penghasilan, sehingga akan ada tambahan penerimaan pajak yang berasal dari pajak penghasilan.

H₁: PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumberdaya yang ada. Menurut Marliyanti dan Arka (2014) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara langsung terhadap Pajak. Nurcholis (2005) yang mengatakan Jika PDRB meningkat maka kemampuan dalam membayar pajak (*ability to pay*) juga akan meningkat. Sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak.

H₂: Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

Dirjen Pajak, Rahmany (2014) mengatakan bahwa penurunan inflasi berpengaruh ke penerimaan pajak. Karena adanya pertumbuhan penerimaan negara seiring dengan meningkatnya konsumsi yang terjadi di masyarakat.(Rahmany: 2014) Pernyataan tersebut diperkuat oleh Tanzi dalam Nalendra (2014) dimana tingkat inflasi saling berhubungan untuk mempengaruhi penerimaan pajak riil. Sedangkan menurut Ferdiawan (2015) menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun juga ada penelitian lain yaitu Rachman (2014) yang menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak dikarenakan tingkat inflasi rendah belum selaras dengan penerimaan pajak.

H₃: Nilai kurs berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

Pertumbuhan nilai tukar mata uang yang berfluktuasi dapat mempengaruhi harga. Peningkatan atau penurunan penghasilan wajib pajak akibat fluktuasi kurs mata uang akan mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah dan potensi beban pajak penghasilan wajib pajak. Ferdiawan (2015) menemukan bahwa nilai kurs berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H₄: Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

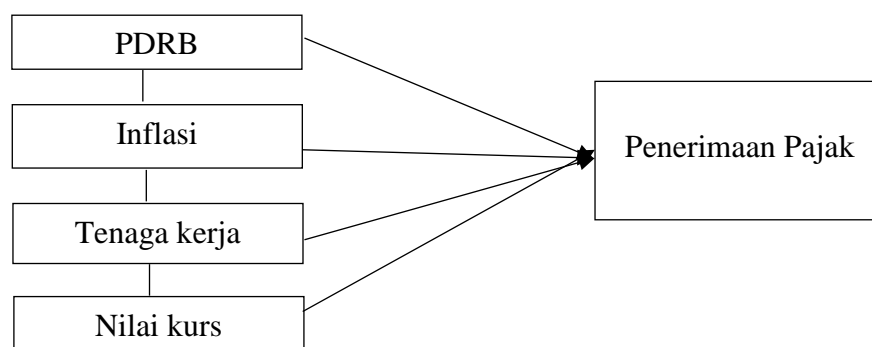
Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi diantara yaitu tenaga kerja (Sukirno dalam Rustiono, 2008). Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan proses yang dilakukan secara bertahap, yakni dari pembuatan proposal, survey awal ke objek penelitian, pengumpulan data dari objek penelitian, tabulasi data yang diperoleh dari objek penelitian, analisis data, dan membuat laporan hasil penelitian. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan desain riset deskriptif.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada wilayah kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo dimana wilayah ini masih dalam satu kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Penelitian ini dilakukan untuk masa 3 tahun yaitu 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015. Peneliti mengolah data yang ada menggunakan alat analisis yaitu SPSS 21.0.

Penelitian ini merupakan pengaplikasian atau pengujian model penelitian guna mengetahui seberapa besar hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Model penelitian ini memiliki variabel penerimaan pajak, variabel PDRB, variabel tenaga kerja, variabel inflasi dan variabel nilai kurs.



Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data penerimaan pajak dari KPP Pratama Wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo, data PDRB inflasi, dan tenaga kerja dari BPS kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo, serta data nilai kurs dari Bank Indonesia. Model dalam penelitian ini memiliki variabel penerimaan pajak, variabel PDRB, variabel inflasi, variabel tenaga kerja, dan variabel inflasi.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Berdasarkan populasi tersebut maka penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling *non- probability sampling* dengan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi kecil kurang dari 30 orang (Sugiyono, 2008). Sampel dalam penelitian ini adalah wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara parsial maupun secara simultan.

Uji asumsi klasik

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut:

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel

kecil. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $>0,05$ (Ghozali, 2011).

Menurut Imam Ghozali (2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. (Ghozali, 2011).

Uji hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis linier berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Model persamaan regresi yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

Y : Penerimaan pajak

a : konstanta

$b_{1,2,3,4}$: koefisien regresi untuk variabel X_1, X_2, X_3, X_4

X_1 : PDRB

X_2 : Inflasi

X_3 : Nilai kurs

X_4 : Tenaga kerja

e : Faktor pengganggu di luar model (kesalahan regresi)

Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Uji Parsial (uji t)

Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar

0,05 ($\alpha = 5\%$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

Ho : $b_i = 0$

HA : $b_i \neq 0$

1) Pengaruh PDRB (X_1) terhadap Penerimaan pajak (Y).

Ho₁ : $b_1 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif X_1 terhadap Y

Ha₁ : $b_1 > 0$, terdapat pengaruh positif X_1 terhadap Y

2) Pengaruh Inflasi (X_2) terhadap Penerimaan pajak (Y).

Ho₂ : $b_2 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif X_2 terhadap Y

Ha₂ : $b_2 > 0$, terdapat pengaruh positif X_2 terhadap Y

3) Pengaruh Nilai kurs (X_3) terhadap Penerimaan pajak (Y).

Ho₃ : $b_3 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif X_3 terhadap Y

Ha₃ : $b_3 > 0$, terdapat pengaruh positif X_3 terhadap Y

4) Pengaruh Tenaga kerja (X_4) terhadap Penerimaan pajak (Y).

Ho₄ : $b_4 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif X_4 terhadap Y

Ha₄ : $b_4 > 0$, terdapat pengaruh positif X_4 terhadap Y

Ketentuan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

1) Jika tingkat signifikansi $\leq 5\%$, Ho ditolak dan Ha diterima

2) Jika tingkat signifikansi $\geq 5\%$, Ho diterima dan Ha ditolak

a. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen/terikat. Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Prosedur Uji F ini adalah sebagai berikut :

1) Menentukan hipotesis nol maupun hipotesis alternatifnya :

Ho : $b_1 = b_2 = b_3 = 0$, berarti tidak ada pengaruh X_1, X_2, X_3, X_4 terhadap Y

Ha : $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, berarti ada pengaruh X_1, X_2, X_3, X_4 terhadap Y

2) Membuat keputusan uji F

Jika nilai F lebih besar dari pada 4 maka Ho ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain hipotesis alternatif (Ha) diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil penelitian mengenai pengaruh dari PDRB, inflasi, nilai kurs dan tenaga kerja terhadap penerimaan pajak (Studi kasus pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi dapat dipakai. Uji tersebut meliputi uji multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $>0,05$ (Ghozali, 2011).

Tabel 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0001369
	Std. Deviation	124850227629.75558000
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.129
	Negative	-.137
Kolmogorov-Smirnov Z		.613
Asymp. Sig. (2-tailed)		.847

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 1., diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,847 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang di uji berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 2. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	819805563948.824	1016420611837.094		.807	.433		
1 PDRB	.005	.002	.478	2.786	.014	.500	2.001
INFLASI	4673839577.291	5655688535.874	.110	.826	.422	.832	1.202
NILAI_KURS	-99076883.533	96862711.597	-.130	-1.023	.323	.910	1.099
TENAGA_KERJA	781475.564	320175.645	.428	2.441	.028	.477	2.094

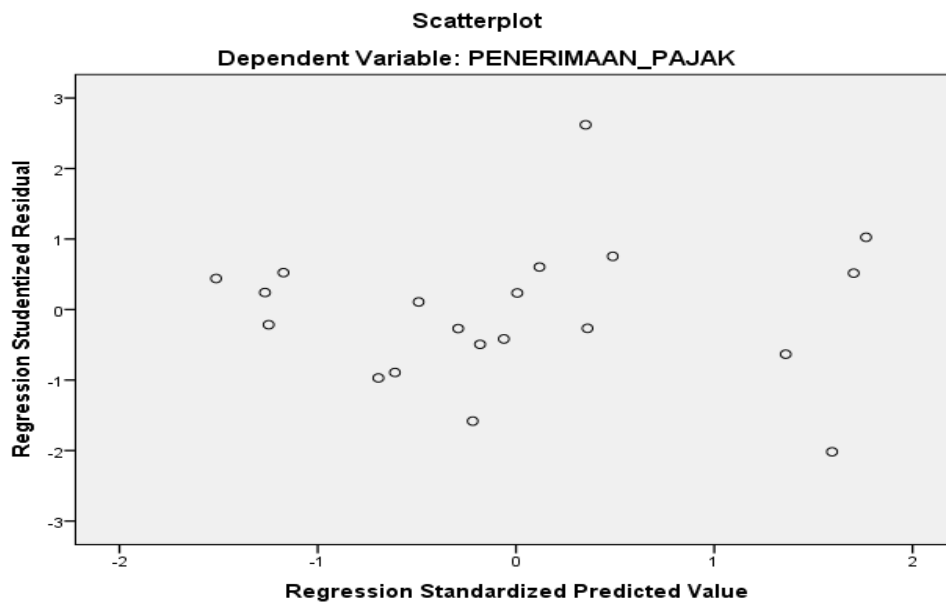
a. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 2., diketahui bahwa nilai tolerance variabel PDRB, inflasi, nilai kurs, dan tenaga kerja yakni 0,500; 0,832; 0,910; dan 0,477 lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai VIF variabel PDRB, inflasi, nilai kurs, dan tenaga kerja yakni 2,001; 1,202; 1,099; dan 2,094 lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. (Ghozali, 2011).



Gambar 1. Grafik Plot

Sumber: data diolah

Berdasarkan Gambar 1., diketahui bahwa titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali serta penyebaran titik titik data tidak berpola. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB (X_1), inflasi (X_2), nilai kurs (X_3) dan tenaga kerja (X_4) terhadap variabel penerimaan pajak (Y). Berikut adalah hasil *output* spss

Tabel 3. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	819805563948.824	1016420611837.094		.807	.433
	PDRB	.005	.002	.478	2.786	.014
	INFLASI	4673839577.291	5655688535.874	.110	.826	.422
	NILAI_KURS	-99076883.533	96862711.597	-.130	-1.023	.323
	TENAGA_KERJA	781475.564	320175.645	.428	2.441	.028

a. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK
 Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 3, didapat koefisien regresi sehingga persamaan regresinya dapat disusun sebagai berikut.

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4 + e$$

$$Y = 819805563948.824 + 0,005X_1 + 4673839577.291X_2 + (-99076883.533)X_3 + 781475.564X_4 + e$$

Penjelasan:

Konstanta (a)

a (*alpha*) pada persamaan diatas adalah nilai konstanta atau nilai tetap penerimaan pajak (Y) yang tidak dipengaruhi oleh PDRB (X_1), inflasi (X_2), nilai kurs (X_3) dan tenaga kerja (X_4), maka penerimaan pajak (Y) bernilai sebesar nilai konstanta yaitu 819805563948.824.

Variabel Independen

$$b_1 = 0,005$$

Koefisien regresi untuk PDRB (X_1) sebesar 0,005, artinya setiap kenaikan/ bertambahnya satu satuan pada variabel PDRB (X_1), akan menyebabkan perubahan/bertambahnya penerimaan pajak (Y) sebesar 0,005 poin, apabila variabel independen lain nilainya tetap.

$$b_2 = 4673839577.291$$

Koefisien regresi untuk inflasi (X_2) sebesar 4673839577.291, artinya setiap kenaikan/ bertambahnya satu satuan pada variabel inflasi (X_2), akan menyebabkan perubahan/bertambahnya penerimaan pajak (Y) sebesar 4673839577.291 poin, apabila variabel independen lain nilainya tetap.

$$b_3 = (-99076883.533)$$

Koefisien regresi untuk nilai kurs (X_3) sebesar (-99076883.533), artinya setiap kenaikan/ bertambahnya satu satuan pada variabel nilai kurs (X_3), akan

menyebabkan perubahan/berkurangnya penerimaan pajak (Y) sebesar 99076883.533 poin, apabila variabel independen lain nilainya tetap.

$$b_4 = 781475.564$$

Koefisien regresi untuk tenaga kerja (X_4) sebesar 781475.564, artinya setiap kenaikan/bertambahnya satu satuan pada variabel tenaga kerja (X_4), akan menyebabkan perubahan/bertambahnya penerimaan pajak (Y) sebesar 781475.564 poin, apabila variabel independen lain nilainya tetap.

Pengujian hipotesis pengaruh PDRB (X_1), inflasi (X_2), nilai kurs (X_3) dan tenaga kerja (X_4) terhadap penerimaan pajak (Y)

Untuk menguji koefisien regresi secara sendiri-sendiri pengaruh variabel PDRB (X_1), inflasi (X_2), nilai kurs (X_3), dan tenaga kerja (X_4) terhadap penerimaan pajak (Y) digunakan uji t. Ketentuan pengujian, tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$), tingkat keyakinan sebesar 95% (0,95). Pedoman penarikan kesimpulan yaitu jika nilai signifikansi $< 0,05$, dan t hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan jika nilai signifikansi $> 0,05$, dan t hitung $< t$ tabel maka H_0 diterima.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa:

Variabel PDRB (X_1) terhadap variabel penerimaan pajak (Y) mempunyai nilai t hitung 2,786 $> t$ tabel 2,08596 dengan tingkat signifikan 0,014 $<$ dari nilai $\alpha = 0,05$, yang berarti PDRB (X_1) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y).

Penerimaan pajak pada wilayah kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo dipengaruhi oleh tinggi rendahnya PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Sumber penerimaan dominan diantaranya diperoleh dari sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan sektor Industri. Semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi penerimaan pajak di wilayah kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Cui dalam Wijayanti (2015) yang menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penerimaan pajak dengan faktor ekonomi makro berupa produk domestik bruto. Hal yang sama juga di dukung oleh Marliyanti dan Arka (2014) dan juga Nurcholis (2005).

Variabel inflasi (X_2) terhadap variabel penerimaan pajak (Y) mempunyai nilai t hitung 0,826 $< t$ tabel 2,08596 dengan tingkat signifikan 0,422 $>$ dari nilai $\alpha = 0,05$ yang berarti inflasi (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Penerimaan pajak pada wilayah kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo tidak dipengaruhi oleh inflasi. Masalah yang muncul pada penerimaan pajak yaitu belum mencapai target yang telah ditentukan karena tingkat inflasi rendah belum selaras dengan penerimaan pajak pada wilayah kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Karakter kebijakan fiskal Indonesia lebih cenderung asiklikal atau bahkan prosiklikal. Kesimpulan tersebut juga diperkuat oleh riset di Bank Indonesia (2009) bahwa kebijakan fiskal Indonesia cenderung bersifat asiklikal secara agregat atau justru prosiklikal jika berdasarkan pengelompokan pengeluaran. Sifat siklikalitas yang

demikian berpotensi memberikan tekanan instabilitas dalam perekonomian , seperti kenaikan inflasi (Surjaningsih dkk, 2012). Hasil penelitian ini di dukung oleh Rachman (2014) yang menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Variabel nilai kurs (X_3) terhadap penerimaan pajak (Y) mempunyai nilai t hitung $(-1,023) < t_{\text{tabel}} 2,08596$ dengan tingkat signifikan $0,323 > \alpha = 0,05$ yang berarti nilai kurs (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Penerimaan pajak pada wilayah kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo tidak dipengaruhi oleh nilai kurs. Pelemahan nilai tukar rupiah lebih disebabkan oleh kebijakan – kebijakan dari pihak luar negeri dan kebijakan pemerintah yang bisa dikatakan belum cukup efektif dan sikap yang kurang tegas dalam menghadapi permasalahan tersebut. Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Ferdiawan (2015).

Variabel tenaga kerja (X_4) terhadap variabel penerimaan pajak (Y) mempunyai nilai t hitung $2,441 > t_{\text{tabel}} 2,08596$ dengan tingkat signifikan $0,028 < \alpha = 0,05$, yang berarti tenaga kerja (X_4) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Penerimaan pajak pada wilayah kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tenaga kerja. Semakin tinggi tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut maka semakin tinggi penerimaan pajaknya. Kondisi pasar tenaga kerja yang telah membaik serta program pengentasan kemiskinan yang semakin efektif telah membantu meningkatkan pendapatan dan kepercayaan rumah tangga. Hal ini di dukung hasil dari OECD 2015 yaitu tangani informalitas pasar tenaga kerja dengan cara mengurangi kekakuan dalam sektor formal dan dengan cara meningkatkan efektivitas sistem transfer pajak untuk mengentaskan kemiskinan dan menyalurkan berbagai manfaat sosial lainnya. Hasil penelitian ini didukung oleh Sukirno dalam Rustiono, 2008 yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak.

Uji simultan (uji F)

Uji simultan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1					
Regression	104606576636213630 0000000.000	4	261516441590534070 000000.000	13.245	.000 ^b
Residual	296164007444834100 000000.000	15	197442671629889400 00000.000		
Total	134222977380697040 000000.000	19			

a. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

b. Predictors: (Constant), TENAGA_KERJA, NILAI_KURS, INFLASI, PDRB

Sumber: data diolah

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan f hitung sebesar 13,245 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel PDRB (X_1), inflasi (X_2), nilai kurs (X_3) dan tenaga kerja (X_4), berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penerimaan pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 5. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.883 ^a	.779	.721	140514295226.461

a. Predictors: (Constant), TENAGA_KERJA, NILAI_KURS, INFLASI, PDRB

b. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas *adjusted R Square* mempunyai nilai 0,721 artinya kontribusi variabel PDRB (X_1), inflasi (X_2), nilai kurs (X_3) dan tenaga kerja (X_4) terhadap penerimaan pajak (Y) adalah 72,1% sedangkan sisanya ($100 - 72,1$) = 27,9% dipengaruhi variabel lain diluar model.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi mengenai analisis Pengaruh PDRB, inflasi, nilai kurs, dan tenaga kerja terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu secara parsial, PDRB dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo sedangkan inflasi dan nilai kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo.

Secara simultan, PDRB, inflasi, nilai kurs dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Dapat dijelaskan bahwa sebesar 72,1% variasi perubahan realisasi penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo secara bersama-sama oleh variasi PDRB, inflasi, nilai kurs dan tenaga kerja, sedangkan sisanya sebesar 27,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdeteksi dalam model.

Implikasi dari penelitian ini adalah sumber pendapatan/penghasilan pada wilayah Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo rata-rata dari pertanian, perkebunan, dan perdagangan regional serta perdagangan nasional maka belum bisa maksimal untuk mencapai target penerimaan pajak. Kedepannya semakin banyak kegiatan perdagangan yang berskala internasional maka akan

meningkat pula penerimaan pajak di wilayah tersebut, sehingga target pajak yang ditetapkan akan tercapai atau bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan tersebut.

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu memperluas objek penelitian yaitu tidak hanya pada wilayah kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo tetapi semua wilayah yang tergabung dalam DJP Jateng II. Selain itu juga bisa ditambahkan faktor-faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi penerimaan pajak. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini 27,9% masih dipengaruhi oleh faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferdiawan, Mohammad Andhika. (2015). Pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga sertifikat bank indonesia, dan nilai tukar kurs terhadap penerimaan pajak penghasilan (studi pada penerimaan pajak penghasilan dalam kurun waktu 2005 – 2014. Di akses pada 15 Mei 2016. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/147>.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Hyman, D.N. (2011). *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*. 10th edn. Mason: South-Western Cengage Learning.
- Istianto, Donna Dwi. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di kabupaten Semarang tahun 2000 – 2009. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Marliyanti, Dwi Sundi dan Arka, Sudarsana. (2014). Pengaruh PDRB terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar. *E-Journal EP Unud*. Vol. 3 No. 6:265-271.
- Mulyadi, S. (2003). *Ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif pembangunan*. Cetakan kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nalendra, Encep Herdiana Rachman. (___). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak (survei pada provinsi Jawa Barat periode 2008 – 2012. Diakses dari [elib.unikom.ac.id>download](http://elib.unikom.ac.id/download)
- Nurcholis, Hanif. (2005). *Pemerintah dan Otonomi daerah*. Jakarta: Grasindo.
- OECD Economic Surveys: Indonesia 2015. (2015). Survei Ekonomi OECD Indonesia. <https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf>
- Rachman, Encep Herdiana. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2012). <http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-encepherdi-35766>
- Rahmany, Fuad. (2014). Kepatuhan wajib pajak masih minim (online). Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/makro/14/09nble57-kepatuhan-wajib-pajak-masih-minim> (10 Mei 2016)

Rahmany, Fuad. (2011). *Banyak Orang Kaya & Pengusaha Tak Bayar Pajak*. Diakses pada 21 Mei 2011 dari world wide web : <http://economy.okezone.com/read/2011/05/21/20/459419/dirjen-pajak-banyak-orang-kaya-pengusaha-tak-bayar-pajak>

Sugiono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukirno, Sadono. (2012). *Makro ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.

Surjaningsih, Ndari, G.A. Diah Utari, dan Budi Trisnanto. (2012). Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. <http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/documents/259779accf9e4b709a9b933ceffbc3e3ndarisurjaningsihgadiahutaribudi trisnanto.pdf>

Tarigan, Robinson. (2005). *Ekonomi regional teori dan aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi aksara.

UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Waluyo. (2006). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: salemba empat.

Wijayanti, Amalia. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Indonesia: Pendekatan Ekonomi Makro. *Skripsi*. http://eprints.undip.ac.id/46504/1/17_WIJAYANTI.pdf.

Yeni. Rahma. (2013). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Padang. *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.

<http://m.tribunnews.com/bisnis/2014/03/24/inflasi-melambat-penerimaan-pajak-diyakini-lebih-baik-dari-2013> diakses 12 Mei 2016

<http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20338741.pdf> diakses 12 Mei 2016

<http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-107449.pdf> diakses 12 Mei 2016

http://eprints.undip.ac.id/46504/1/17_WIJAYANTI.pdf diakses 12 Mei 2016

<http://sport.detik.com/aboutthegame/read/2014/06/12/163533/2606547/4/asumsi-kurs-berubah-setoran-pajak-bertambah-rp-4-triliun> diakses 12 Mei 2016

<http://nasional.kontan.co.id/news/nilai-tukar-rupiah-jadi-tantangan-apbn-tahun-ini>

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/11/369867/rupiah-turun-indonesia-genjot-penerimaan-pajak> diakses 12 Mei 2016

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/14/122832126/Realisasi.Pajak.2014.Terendah.dalam.25.Tahun.Terakhir> diakses 12 Mei 2016

<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/perkumpulan-prakarsa-penerimaan-pajak-2013-tidak-mencapai-target-apbn-p-2013> diakses 12 Mei 2016

<http://id.123doc.org/document/44987-pengaruh-nilai-tukar-mata-uang-rupiah-dan-tingkat-inflasi-terhadap-penerimaan-pajak-pertamabahan-nilai-impor-pada-kantor-pelayanan-pajak-madya-medan.htm> diakses 12 Mei 2016

<http://www.jatengprov.go.id/id/newsroom/naik-94-kpp-pratama-lampaui-target-penerimaan-pajak-2014> diakses 12 Mei 2016